

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andriansyah. (2015). *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (pertama). Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Hartono. (2010). *Penyidik dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana* (Pertama). Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardi, P. (2007). *Profesionalisme dan Reformasi Polri* (1 ed.). Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ridwan, H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara* (Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadjijono. (2005). *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governace* (1 ed.). Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta.
- Saleh, R. (1990). *Pembuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Mandar Majur*. Bandung: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- Soetarna, H. (2011). *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT. Alumni.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Hukum UNDIP.
- Sujono, A. (2011). *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.

**B. Jurnal**

- Athia, A. D., & Diani, A. (2014). Pengaruh Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Terhadap Kekuatan Barang Bukti Di Persidangan. *Serambi Hukum, 08*, 253–254.
- Barama, M. (2011). Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Samratulangi*.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (n.d.). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum, 323–340*.
- Firmansyah, A., Widodo, H., & Mamang, D. (2022). Tinjauan Hukum Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, 8*, 129–131.
- Hidayat, M. S. N. (2012). Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Masalah-Masalah Hukum, 50–58*.
- Kurniawan, R. A. (2018). Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. *Masalah-Masalah Hukum, 111–117*.
- Lestari, H. D. (2023). Pembingkai Berita Penangkapan Irjen Polri Teddy Minahasa Putra Dalam Kasus Peredaran Narkoba di Media Online Detik.com dan MinangkabauNews. *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan, 6*, 20–24.
- Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Artha, R. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *E-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 1*, 251–253.
- Suntaka, A. T. U. (2017). Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, VI, 55–58.

Yunika, R. (2018). *Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Sriwijaya.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 14 (2011). Diambil dari <https://www.peraturanpolri.com/2015/09/peraturan-kapolri-nomor-14-tahun-2011.html>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 10 (2010). Diambil dari <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-10-tahun-2010>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Pub. L. No. 14 (2012). Diambil dari <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-14-tahun-2012>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 8 (2014). Diambil dari <https://peraturan.go.id/id/peraturan-polri-no-8-tahun-2014>

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pub. L. No. 40 (2013). Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5372/pp-no-40-tahun-2013>

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pub. L. No.

35 (2009). Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38776/uu-no-35-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pub. L. No. 2 (2002). Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 8 (1981). Diambil dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1981/8TAHUN~1981UU.HTM>